

DAFTAR PUSTAKA

1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang disahkan pada 10 Desember 1948.
2. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi No. 109 Tahun 1990
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2).
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
8. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang secara spesifik mengatur segala aspek kehidupan perempuan, termasuk anak, yang bebas diskriminasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, politik dan budaya, dan perlindungan dari kekerasan.
9. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
10. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 ayat (4).
11. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).
12. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disahkan pada bulan Oktober 2002.
13. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
19. Peraturan Menteri Kehakiman No. M 06-UM.01.06 Tahun 1983 Bab II, Pasal 9--12, tentang Tata Tertib Sidang Anak.
20. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987 Tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
21. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak.
22. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan terhadap Anak.
23. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang Kewajiban Setiap PN Mengadakan Ruang Sidang Khusus dan Ruang Tunggu Khusus untuk Anak yang akan Disidangkan.
24. Surat Edaran Kapolri Nomor B/2160/IX/2009/BARESKRIM Tanggal 3 September 2009 tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan Hukum.
25. Surat Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tanggal 15 Desember 2009.
26. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, No. 166/KMA/SKB/XII/ 2009, No.148 A/A/JA/12/2009, No. B/45/XII/2009, No. M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, No. 10/PRS-2/KPTS/2009, No. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

27. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 Ditbinrehsos Depsos RI dan Ditpas Depkumham RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
28. Modul Bahan Ajar Asesmen Resiko dan Kriminogenik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2011.
29. Modul Terpadu Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2012.
30. Sistem Database Pemasyarakatan, Juni 2013.
31. Modul bagi PK Bapas, Modul I : Tugas dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2013.
32. Modul bagi PK Bapas, Modul II : Dasar-dasar Pembimbingan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2013.
33. Modul bagi PK Bapas, Modul III :Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2013.
34. Modul bagi PK Bapas, Modul IV : Manajemen Kasus, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2013.
35. Modul bagi PK Bapas, Modul V : Diversi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2013.